



Kementerian PPN/
Bappenas



PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Hasil Diskusi FGD Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Wilayah RPJMN 2025 – 2029 Wilayah Papua

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

Jakarta, 2-4 Oktober



I. Gambaran Capaian Makro Daerah



Gambaran Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2023

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			
	2020	2021	2022	2023
PAPUA BARAT	-0,76	-0,51	2,01	3,91
PAPUA	2,39	15,16	8,97	5,22

Keterangan Capaian Indikator Makro 2020-2023:

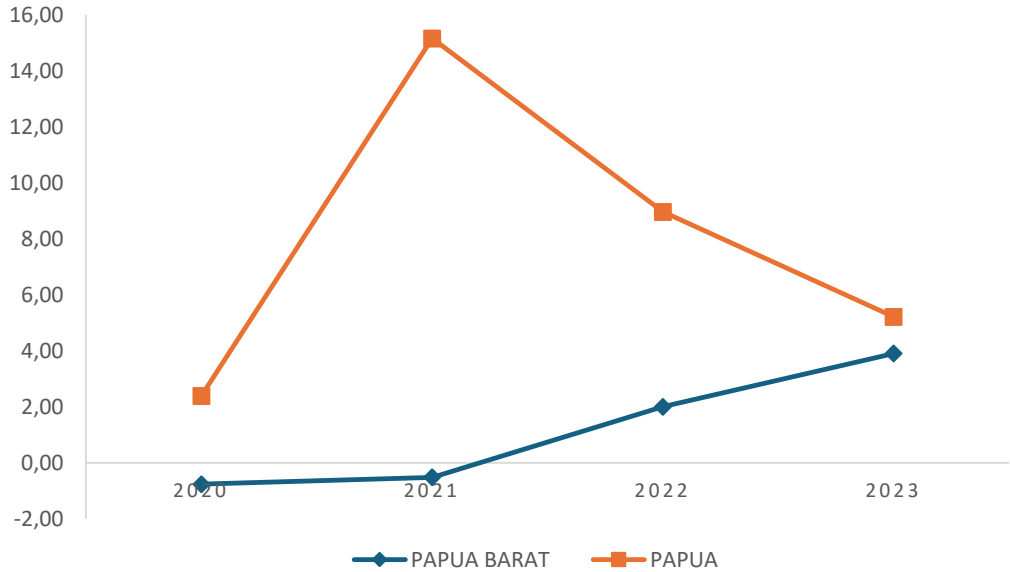


Keterangan warna pada **heatmap** merupakan **perbandingan relatif** antar daerah dalam wilayah yang sama

Provinsi	Tren Kinerja			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata
PAPUA BARAT	Stagnan	Membaik	Membaik	Membaik
PAPUA	Membaik	Melambat	Melambat	Stagnan

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2020-2023:

- Membaik : Tren Kinerja Membaik (tren $\geq 15\%$)
- Stagnan : Tren Kinerja Stagnan ($0 < \text{tren} < 15\%$)
- Melambat : Tren Kinerja Melambat ($< 0\%$)



- Capaian indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2023 cukup fluktuatif
- Secara umum, tren kinerja indikator pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Papua masih belum baik. Khususnya provinsi Papua, tren kinerja pertumbuhannya melambat pada tahun 2021-2023

Sumber data: EPD, 2024

Faktor Pendukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah :

1. Potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perikanan dan kehutanan, mineral yang memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi
2. Peningkatan pembangunan sektor pariwisata, penguatan industri pengolahan dan pelaku ekonomi
3. Peningkatan investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan transportasi, membantu memperlancar aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah
4. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan
5. Adopsi teknologi informasi dan digital dalam UMKM
6. Kebijakan dan program pemerintah pusat serta daerah yang mendukung pembangunan wilayah Papua seperti Otsus
7. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani
8. Mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata alam dan budaya sebagai sumber pendapatan daerah

Faktor Penghambat Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah :

1. Ketidakstabilan keamanan di beberapa daerah dapat menghambat investasi dan aktivitas ekonomi.
2. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan dan hutan yang lebat, menyulitkan pembangunan infrastruktur.
3. Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dalam Papua
4. Kurangnya konsistensi dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga non-pemerintah dapat mengakibatkan program tidak terintegrasi dan menghambat efektivitas pembangunan
5. Kebijakan yang ditetapkan tanpa melibatkan masukan dari masyarakat lokal dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan harapan mereka.
6. Prosedur birokrasi dan perizinan yang cukup rumit
7. Belum optimalnya penggunaan dana otsus dalam pembangunan
8. Praktik korupsi dan pengelolaan anggaran yang tidak efisien dapat menghambat realisasi proyek pembangunan.
9. Hilirisasi industri belum optimal
10. Pembangunan tidak mempertimbangkan nilai dan kearifan lokal sehingga mengakibatkan resistensi dari masyarakat.
11. Pengembangan lingkungan yang tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan
12. Hak kepemilikan tanah.

Intervensi optimal mendukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah *) :

1. Kebijakan otonomi khusus dan dana transfer
2. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, infrastruktur, pelabuhan, bandara dan irigasi
3. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal
4. Pemberian akses modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing
5. Pelatihan pengelolaan pariwisata kepada masyarakat lokal
6. Program konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati
7. Adopsi teknologi dalam UMKM dan sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar.

Intervensi kurang optimal mendukung Capaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah *) :

1. Pengembangan sektor non pertambangan
2. Program diversifikasi ekonomi
3. Pelatihan UMKM
4. Program pengembangan lingkungan
5. Program hilirisasi industri
6. Regulasi yang tidak efisien dalam melakukan pengembangan ekonomi

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

Gambaran Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2023

Provinsi	Tingkat Kemiskinan			
	2020	2021	2022	2023
PAPUA BARAT	21,37	21,84	21,33	20,49
PAPUA	26,64	26,86	26,56	26,03

Keterangan Capaian Indikator Makro 2020-2023:

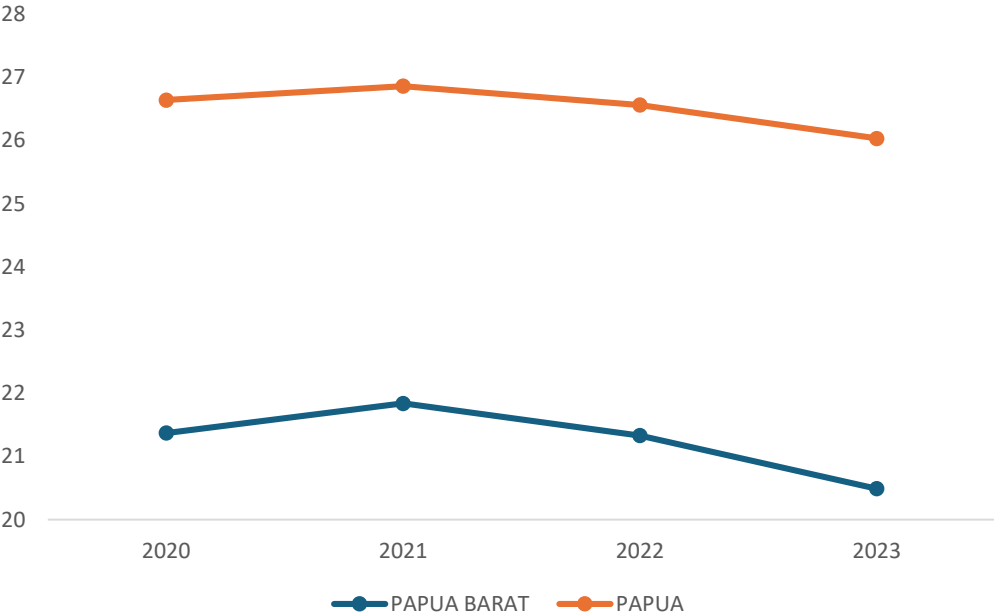


Keterangan warna pada heatmap merupakan **perbandingan relatif** antar daerah dalam wilayah yang sama

Provinsi	Tren Kinerja			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata
PAPUA BARAT	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik
PAPUA	Melambat	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2020-2023:

- Membaik : Tren Kinerja Membaik (tren $\geq 15\%$)
- Stagnan : Tren Kinerja Stagnan ($0 < \text{tren} < 15\%$)
- Melambat : Tren Kinerja Melambat ($< 0\%$)



- Capaian indikator tingkat kemiskinan tahun 2020-2023 cukup membaik. Walaupun capaiannya masih di atas 20 persen
- Secara umum, tren kinerja indikator tingkat kemiskinan provinsi di Wilayah Papua sudah cukup membaik selama tahun 2020 - 2023

Sumber data: EPD, 2024

Faktor Pendukung Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah :

1. Memperbanyak kemudahan pinjaman modal usaha
2. Perbaikan ketersediaan data kondisi sosial, ekonomi dan geografis

Faktor Penghambat Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah :

1. Akses permodalan kepada unit pengusaha yang belum optimal
2. Kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal
3. Penguasaan lahan pertanian yang kecil
4. Penghasilan masyarakat papua yang masih rendah
5. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar
6. Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah dalam Papua
7. Keterbatasan infrastruktur (transportasi, energi, air bersih dan telekomunikasi).

Intervensi optimal mendukung Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah *) :

1. Pemberian modal kepada unit pengusaha
2. Pengembangan akses ekonomi lokal
3. Pengembangan infrastruktur dasar
4. Pemberdayaan masyarakat dan komunitas
5. Reformasi kebijakan dan regulasi
6. Kolaborasi kemitraan dan penguatan jejaring informasi social
7. Pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
8. Pembangunan fasilitas publik sarana dan prasarana seperti rumah sakit dan sekolah

Intervensi kurang optimal mendukung Capaian Tingkat Kemiskinan Daerah *) :

1. Sinkronisasi dan upadte data kemiskinan
2. Pembangunan infrastruktur SPM (transportasi, energi, air bersih dan telekomunikasi).
3. Fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tidak menyeimbangkan dengan pemberdayaan.
4. Perlindungan Sosial yang masih rendah untuk golongan menengah kebawah.

Gambaran Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2023

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia			
	2020	2021	2022	2023
PAPUA BARAT	65,94	66,11	66,72	67,47
PAPUA	61,22	61,40	62,16	63,01

Keterangan Capaian Indikator Makro 2020-2023:

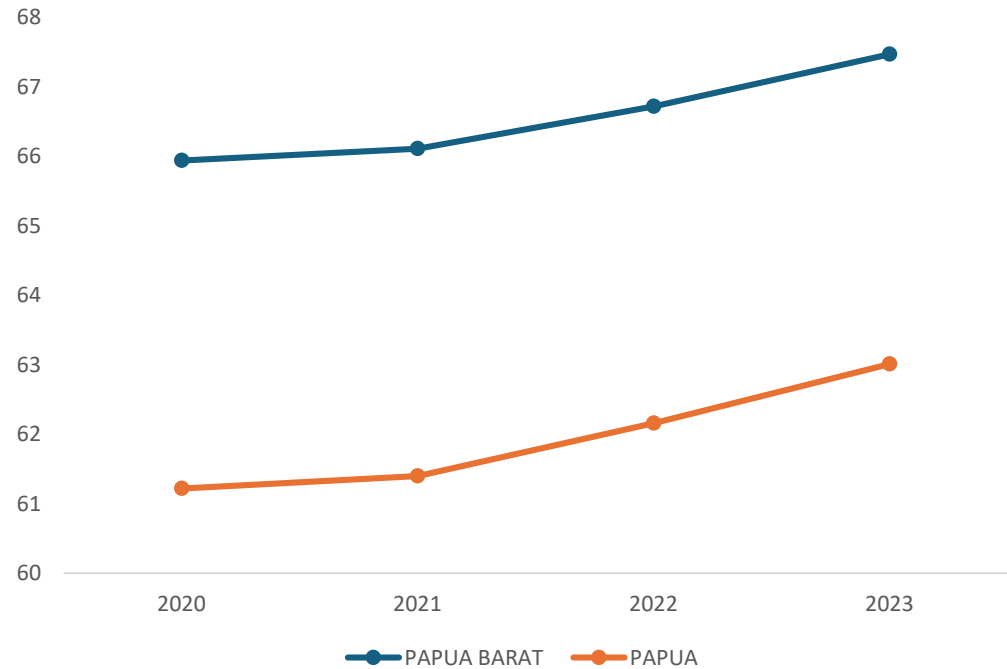


Keterangan warna pada heatmap merupakan **perbandingan relatif** antar daerah dalam wilayah yang sama

Provinsi	Tren Kinerja			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-rata
PAPUA BARAT	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik
PAPUA	Membaik	Membaik	Membaik	Membaik

Keterangan Tren Kinerja Indikator Makro 2020-2023:

- Membaik : Tren Kinerja Membaik (tren $\geq 15\%$)
- Stagnan : Tren Kinerja Stagnan ($0 < \text{tren} < 15\%$)
- Melambat : Tren Kinerja Melambat ($< 0\%$)



- Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020-2023 cukup membaik. Walaupun capainnya masih di bawah angka 70.
- Secara umum, tren kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Wilayah Papua membaik hingga tahun 2023.

Sumber data: EPD, 2024

Faktor Pendukung Capaian IPM Daerah :

1. Peningkatan dan pemberian pelatihan kepada tenaga pendidikan
2. Perbaikan ketersediaan data kondisi sosial, ekonomi dan geografis yang mendukung indeks pembangunan manusia
3. Belum tepatnya *skill* dengan lapangan pekerjaan yang tersedia
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
5. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
7. Memperbanyak lowongan kerja
8. Kolaborasi kemitraan dan penguatan jejaring informasi sosial
9. Peningkatan kesadaran industri dan pelatihan

Faktor Penghambat Capaian IPM Daerah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih Rendah.
2. Sarana prasana pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masih kurang memadai
3. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan
4. Pembukaan lahan massif belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai

Intervensi optimal mendukung Capaian IPM Daerah *):

1. Program konservasi perlindungan keanekaragaman hayati
2. Pemberian pelatihan usaha dan workshop usaha
3. Program Kartu Papua Sehat
4. Pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar
5. Pelatihan dan *workshop* kerja
6. Pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
7. Pelatihan kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
8. Bantuan biaya Pendidikan dan Kesehatan.
9. Program Kartu Papua Sehat

Intervensi kurang optimal mendukung Capaian IPM Daerah *):

1. Distribusi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang belum merata.
2. Distribusi jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
3. Pelatihan dan Pendidikan vokasi yang tidak relevan untuk kebutuhan pasar, dan bersifat jangka pendek.
4. Program Padat Karya yang dilaksanakan pemerintah bersifat sementara dalam mengurangi pengangguran.
5. Keberlanjutan UKM kurang di perhatikan pemerintah dan pada saat event tertentu di berdayakan.

Keterangan:

*) Intervensi yang dimasukkan merupakan intervensi yang dianggap paling signifikan mempengaruhi capaian.

Dapat berupa intervensi pusat/daerah/swasta

II. Rumusan Isu Strategis Kewilayahan



No	Isu Strategis Wilayah	Justifikasi Isu
1	Masih minimnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah 3T	<ul style="list-style-type: none"> Perpres Penetapan Kab tertinggal, pasca pemekaran jumlah Kab berkurang. Beberapa daerah di kawasan perbatasan mulai mengalami peningkatan Karakteristik wilayah menentukan pengembangan wilayah Di setiap daerah Papua pendekatan pembangunannya berbeda-beda dikarenakan kapasitas fiskalnya terbatas.
2	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar daerah	Belum memperhatikan pendekatan ekologi dalam pembangunan
3	Belum optimalnya akses, kualitas dan tata kelola pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya penguatan program pendukung pembangunan manusia Perlu pengembangan pendidikan vokasi
4	Belum merata dan memadainya akses dan mutu pelayanan Kesehatan	Kapasitas fiskal daerah terbatas dalam upaya menajamkan dan mengoptimalkan pencapaian IPM dan akses pelayanan dasar
5	Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem, angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting	Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi
6	Rendahnya keterlibatan OAP dalam memberikan masukan kebijakan	Keterlibatan OAP dan masyarakat dalam memberikan masukan kebijakan masih minim, sehingga perlu menjadi perhatian

Isu Strategis Kewilayahan: Papua

No	Isu Strategis Wilayah	Justifikasi Isu
7	Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan	
8	Tingginya kerentanan sosial masyarakat	
9	Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	Dipengaruhi pengangguran terbuka dan inflasi
10	Masih rendahnya penguatan nilai tambah dari sektor unggulan perekonomian daerah	Diperlukan penguatan ekonomi rumah tangga dan pertanian
11	Tingginya kerawanan pangan	

III. Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan



Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan: Papua

No	Isu Strategis Wilayah	Usulan Arah Kebijakan
1	Masih minimnya ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah 3T	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah 3T Percepatan aksesibilitas dan sarana prasarana kewilayahan
2	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar daerah	Penguatan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar daerah
3	Belum optimalnya akses, kualitas dan tata kelola pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkata akses, kualitas dan tata kelola Pendidikan Pemerataan guru dan sarpras pendidikan. Penguatan Sekolah Komunitas.
4	Belum merata dan memadainya akses dan mutu pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Pemerataan dokter dan sarpras kesehatan. Adanya kebijakan jaminan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan yang lebih luas.
5	Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem, angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting	<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting dan pengangguran terbuka Upaya Penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting Mendorong Kab/Kota untuk menyusun rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem.
6	Rendahnya keterlibatan OAP dan masyarakat dalam memberikan masukan kebijakan	Penguatan partisipasi OAP dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Usulan Arah Kebijakan Kewilayahan: Papua

No	Isu Strategis Wilayah	Usulan Arah Kebijakan
7	Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penanganan permasalahan keamanan, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan • Penguatan pemenuhan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan termasuk pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal. • Penguatan kelembagaan adat dan agama.
8	Tingginya kerentanan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian implementasi perencanaan
9	Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah • Penguatan Pendidikan vokasi dan optimalisasi Balai Pelatihan Kerja di Kab/Kota berbasis potensi lokal. • Penguatan penerapan teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah.
10	Masih rendahnya penguatan nilai tambah dari sektor unggulan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penguatan nilai tambah dari sektor unggulan perekonomian daerah seperti sektor pertanian • Mendorong pertumbuhan berbasis luas (selain pertambangan dan penggalian). • Hilirisasi komoditas unggulan berbasis pertanian dalam arti luas. • Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk UMKM, pertanian, dan pariwisata, dengan dukungan akses modal dan pelatihan
11	Tingginya kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan ketahanan pangan berbasis potensi wilayah. • Hilirisasi komoditas unggulan berbasis pertanian dalam arti luas. • Mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Terima kasih



dit.peppdbappenas



Direktorat PEPPD



peppd.bappenas.go.id



dit.peppd@bappenas.go.id

